

THE ROLE OF KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID TE PADANG IN COLONIAL ECONOMIC STRUCTURE, 1907-1940

Benny Hamdani

Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
bennyhamdani@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the role of the Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang (Chamber of Commerce and Industry of Padang) in the colonial economic structure, a aspect that has been overlooked in Indonesian economic historiography. The research aims to construct a narrative about the Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang and its role within the colonial economic framework. Through historical methods, the study finds that the establishment of the Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang is closely tied to the European countries' threats to colonial territories. Java served as the central power base for the Dutch, while areas outside Java were marginalized. In order to prevent these marginalized regions from falling into the hands of other European nations, the Dutch sought to integrate the non-Javanese regions with Java, achieved in part through the opening of trade routes in Padang and Makassar in 1852. Padang emerged as the most prominent area outside Java (Buitenbezittingen). Several years after the opening of these routes, the Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang was established through a decree by the Dutch East Indies government. This institution provided a platform for Indo-European entrepreneurs, particularly those of Dutch origin in Padang, to anticipate the growth of trade and shipping on the western coast. The presence of the Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang played a significant role in the colonial economy of Padang. It engaged in various sectors, including import-export, shipping, expeditions, banking credit, mining, agriculture, industry, and more. In the pursuit of business endeavors, economic lobbying was often employed.

Keywords: Chamber of Commerce and Industry, KADIN, export, import, lobbying, economic history

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis peran Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang (Kamar Dagang dan Industri Padang) dalam struktur ekonomi kolonial yang selama ini luput dalam historiografi ekonomi Indonesia. Penelitian ini bermaksud memproduksi narasi tentang Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang serta perannya dalam struktur ekonomi kolonial. Melalui metode sejarah, penelitian ini menemukan bahwa hadirnya Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang tidak bisa dilepaskan dari ancaman negara-negara Eropa atas perebutan wilayah jajahan. Jawa menjadi sentral kekuasaan Belanda, sementara daerah luar Jawa sangat marjinal. Agar daerah yang termarginalkan ini tidak lepas ketangan bangsa Eropa lain, Belanda berupaya mengintegrasikan luar Jawa dengan Jawa melalui pembukaan jalur perdagangan tahun 1852 di Padang dan Makassar. Padang menjadi daerah paling unggul di luar Jawa (Buitenbezittingen). Beberapa tahun setelah dibukanya dua jalur ini, Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang melalui Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda berhasil didirikan. Lembaga ini adalah wadah bagi para pengusaha Indo-Eropa khusus Belanda di Padang untuk mengantisipasi pertumbuhan perdagangan dan pelayaran di pantai barat. Kehadiran Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang sangat berperan dalam perekonomian kolonial di Padang. Banyak bidang usaha yang digeluti, seperti sektor ekspor impor, pelayaran, ekspedisi, kredit perbankan, pertambangan, perkebunan, industri dan lain-lain. Dalam menjalankan usaha-usaha bisnis sering kali lobi-lobi ekonomi dilakukan.

Kata Kunci : Kamer van Koophandel en Nijverheid, KADIN, ekspor, impor, lobi, sejarah ekonomi.

PENDAHULUAN

Sejarah ekonomi pada periode kolonial memang masih menjadi lahan subur untuk diteliti terutama di daerah-daerah luar Jawa. Howard Dick menyebut dalam tulisannya bahwa Belanda mengonsolidasikan kekuasaannya di Jawa dan mengembangkan basis ekonominya hampir secara terpisah dari seluruh Nusantara. (Howard Dick, 2002: 15). Jawa adalah basis utama karena faktor kenyamanan, sedangkan kehadiran Belanda di luar Jawa begitu marjinal. Hal ini menurut Howard Dick, kepulauan luar Jawa yang jarang penduduknya tidak menawarkan pasokan tenaga kerja yang murah. Adapun budidaya tanaman kopi contohnya di Sumatera Barat tahun 1847 dan di daerah Minahasa dipandang Belanda sebagai “beban yang tidak menguntungkan”. Di bukanya dua jalur pelayaran 1852 dari Batavia ke Sumatera Barat (Padang) dan Batavia ke Makassar adalah bentuk integrasi yang dilakukan Belanda dalam mengatasi persaingan tekanan yang kuat dari Eropa. (Howard Dick, 2002: 20)

Sejarah ekonomi Indonesia pada periode sebelumnya disebut dalam beberapa literatur masih berada pada tahap awal atau dalam bahasa lain dianggap kurang berkembang. Kajian sejarah ekonomi Indonesia jauh tertinggal dari pada sejarah sosial dan politik Indonesia. Bahkan Willam J. O'Malley menulis hanya sedikit sekali tokoh-tokoh yang pernah menyebut dirinya sebagai sejarawan ekonomi Indonesia, dan sejarah ekonomi Indonesia masih terbelakang kedudukannya. (O' Malley William, 1988: 2). Awal tahun 1980-an dianggap sebagai kebangkitan studi sejarah ekonomi Indonesia. Thee Kian Wie menyebut hasil konverensi sejarah perekonomian Indonesia yang dihimpun dalam buku yang berjudul *Indonesia Economic History in Dutch Colonial Era* disunting oleh Anne Booth, W.J. O'Malley dan Anna Weidemann dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan studi sejarah ekonomi Indonesia.

Menurut Thee Kian Wie adanya faktor kebangkitan studi dalam sejarah ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa hal penting dan medasar. Faktor tersebut adalah pertama, keterbukaan akses untuk umum terhadap bahan arsip di negeri Belanda dan Indonesia mengenai administrasi pemerintah kolonial sejak abad kesembilan belas dan abad kedua puluh. Kedua, adanya usaha kompilasi dan seleksi sejumlah data statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1816-1940. (Wie The Kian, 1988: xi-xii). Adanya dua faktor ini memberikan perspektif dan dimensi baru dalam studi sejarah ekonomi Indonesia.

Belanda mengantisipasi tekanan yang kuat dari Eropa dengan membuka dua jalur pelayaran baru. Dua jalur pelayaran ini adalah bentuk pengintegrasian Makassar dan Padang dengan Jawa sebagai poros utama Belanda tahun 1852. Adanya pembukaan jalur pelayaran ini mengimplikasikan penegasan penguasaan wilayah baik dalam segi pemerintahan maupun perdagangan di Makassar maupun di Padang. Orang-orang Belanda, seperti pegawai, militer maupun pengusaha datang dan juga didatangkan ke wilayah-wilayah ini. Untuk mengonsolidasikan kekuatan para pengusaha Belanda, pemerintah melalui surat keputusannya tanggal 29 Oktober 1863 membuka *Kamer van Koophandel en Nijverheid* atau Kamar Dagang dan Industri di Padang, begitu juga di Makassar.

Narasi sejarah mengenai *Kamer van Koophandel en Nijverheid*, struktur dan pengaruh bagi perekonomian kolonial dapat memberikan pandangan dan dimensi baru dalam historiografi ekonomi Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya sumber primer berupa laporan tahunan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*. Agar lebih fokus maka permasalahan ini dibatasi pada ruang lingkup wilayah Padang. 1907 dijadikan sebagai batasan awal karena data yang tersedia hanya dari 1907 sampai 1940. Sepanjang

1863-1906 tidak ditemukannya data sama sekali. 1940 adalah akhir periode *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*, bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Tahap yang dilakukan adalah penelitian ini mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang tersedia. Data *Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* ini diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia lantai 23 layanan majalah dan jurnal langka. Sumber lain yang juga tidak kalah penting adalah di dapat dari website www.kitlv.nl dan www.dhelfpher.nl. Juga dari Surat *Kabar De Locomotief Nieuws-, Handels. Wn Advertentieblad* tahun 1895 No. 173, *De Sumatra Post*.

Selain sumber primer yang telah disebutkan di atas, masih perlu kiranya dilakukan studi litetur mencari buku-buku yang terkait dengan sejarah ekonomi kolonial, studi yang menyinggung *Kamer van Koophandel en Nijverheid*, sejarah ekonomi kolonial terkhusus di Sumatra Barat dan lain-lain. Buku-buku didapat perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Negeri Padang. Setelah berhasil menghimpun sumber, penulis mengkritisi sumber-sumber yang di dapat. Menguji konten isi sumber yang satu dengan sumber lain yang berkaitan dengan tema ini. Data-data yang telah dikritisi lalu ditafsirkan. Setelah pemaknaan data selesai, penulis melakukan penulisan atau penyajian data dalam bentuk karya sejarah. Historiografi atau karya sejarah terkait narasi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dan peranannya dalam struktur ekonomi kolonial tahun 1907-1940 akan lahir dari langkah-langkah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi *Kamer van Koophandel en Nijverheid*

Penelitian ini merekonstruksi narasi sejarah mengenai *Kamer van Koophandel en Nijverheid* terutama perannya dalam struktur ekonomi kolonial. Gusti Asnan dalam Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera memang pernah menyinggung *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dalam beberapa paragraf. Oleh karena penelitian ini dirasa penting dalam historiografi ekonomi Indonesia maka penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan itu. Kajian ini mencoba mengupas lebih jauh apa itu *Kamer van Koophandel en Nijverheid*, bagaimana kedudukan dalam struktur ekonomi kolonial, apa-apa saja peran mereka terutama terkait sektor bidang usaha dalam menggerakkan perekonomian sepanjang periode 1907-1940. Penelitian ini baru bisa menggali informasi sejarah *Kamer van Koophandel en Nijverheid* sepanjang periode yang disebut di atas. Untuk perannya diawal berdiri 1863 sampai 1906, tidak ditemukannya sumber-sumber primernya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Oleh karena banyaknya bidang-bidang usaha yang digeluti oleh para pengusaha yang terhimpun dalam *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*, dan penulis dalam penelitian lanjutan baru mampu membahas dalam sektor ekspor impor, maka bidang yang lain masih perlu dicarikan jawabannya dalam bentuk narasi sejarah. Walaupun demikian, penelitian ini mudah-mudahan mampu meletakkan dasar pemahaman mengenai *Kamer van Koophandel en Nijverheid*. Hal ini karena lima buah lembaga ini belum pernah ada yang menulis secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan membuka mata peneliti lain, untuk melihat *Kamer van Koophandel en Nijverheid* di Batavia, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Kamer van Koophandel en Nijverheid adalah lembaga non pemerintah yang mewadahi pengusaha-pengusaha indo-eropa dalam menjalankan berbagai kepentingan bisnisnya di Hindia Belanda. Ada lima buah *Kamer van Koophandel en Nijverheid* di Hindia Belanda, yaitu di Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar dan Padang. (Gusti Asnan, 2007: 133). Howard Dick menyebut dalam tulisannya bahwa Belanda mengonsolidasikan kekuasaannya di Jawa dan mengembangkan basis ekonominya hampir secara terpisah dari seluruh Nusantara. Jawa menjadi sentral bagi kekuasaan Belanda, sedangkan luar Jawa marjinal. Untuk daerah-daerah luar Jawa, Belanda tidak berusaha menguasai wilayah daratan yang luas kecuali hanya mempertahankan pos benteng perdagangan. Untuk wilayah luar Jawa ini, tujuan utama Belanda hanya berdagang dengan hak-hak istimewa. Meskipun Belanda mengklaim atas kedaulatan yang lebih luas, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk mengelolanya. (Dick Howard, 2002: 19)

Pada abad ke-19 mulai muncul perebutan atas batas-batas daerah jajahan negara-negara Eropa. Perebutan ini agar lingkup pengaruh negara-negara Eropa dapat diakui dalam perjanjian internasional. Untuk mengantisipasi perebutan daerah jajahan ini, Belanda mengintegrasikan daerah-daerah luar Jawa dengan Jawa. Sebagai bentuk pengintegrasian daerah luar Jawa dengan Jawa, maka tahun 1852 dibuka dua jalur pelayaran dari Batavia ke Padang, dan Batavia ke Makassar. Pembukaan dua jalur pelayaran ini, mendatangkan sekelompok kecil orang-orang Belanda di Padang dan Makassar. Karena jumlahnya yang kecil maka kehadiran Belanda di daerah-daerah luar Jawa ini pada akhir 1870 digambarkan sebagai pejabat yang sengaja ditempatkan untuk memperingati musuh, dalam bahasa yang lebih sederhana yaitu “orang-orang sawah yang menakut-nakuti penyusup”. (Dick Howard, 2002: 20)

Adanya pembukaan pelayaran antara Batavia dengan Padang tahun 1852, menyuburkan dunia perdagangan dan usaha. Bertemunya orang-orang Belanda atau indo dengan etnis Tionghoa bersama orang Minangkabau dalam kepentingan perdagangan dan usaha di Padang adalah realitas menarik. Belum genap satu dekade dibukanya rute pelayaran Batavia-Padang, pemerintah melalui Surat Keputusannya tanggal 29 Oktober 1863 mendirikan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*. Tidak berselang lama *Kamer van Koophandel en Nijverheid* juga didirikan di Makassar.

Didirikannya *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah dengan tujuan untuk mengantisipasi pertumbuhan kegiatan perdagangan dan pelayaran di kawasan ini. *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* diharapkan menjadi wadah para pengusaha untuk berperan serta memberikan kontribusi bagi dunia niaga pantai barat. Selain sebagai sebuah lembaga yang mewadahi para pengusaha, *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* diharapkan bisa menjadi partner pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan pantai barat sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan perdagangan, pelayaran dan ekonomi, tidak hanya di pantai barat, tetapi juga di Indonesia bagian barat.

Selain alasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa lagi alasan mengapa Padang menjadi pusat *Kamer van Koophandel en Nijverheid* di Indonesia bagian barat atau Sumatera secara umum. Pertama, semenjak Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, jalur perdagangan sedikit bergeser dari pantai timur ke pantai barat Sumatera. Padang diuntungkan karena letaknya persis ditengah-tengah pesisir pantai barat. Padang muncul sebagai pusat-pusat perdagangan bersama dengan Air Bangis, Sibolga dan beberapa daerah pesisir. Hasil bumi berupa komoditas ekspor, juga emas dan dalam perkembangan lebih lanjut batu bara dari pedalaman Minangkabau diangkut dan juga diperjualbelikan di Padang. Padang menjadi gerbang masuk utama di pantai barat. Padang menjadi pelabuhan terakhir kapal-kapal bagi yang hendak meninggalkan Hindia Belanda via pantai barat.

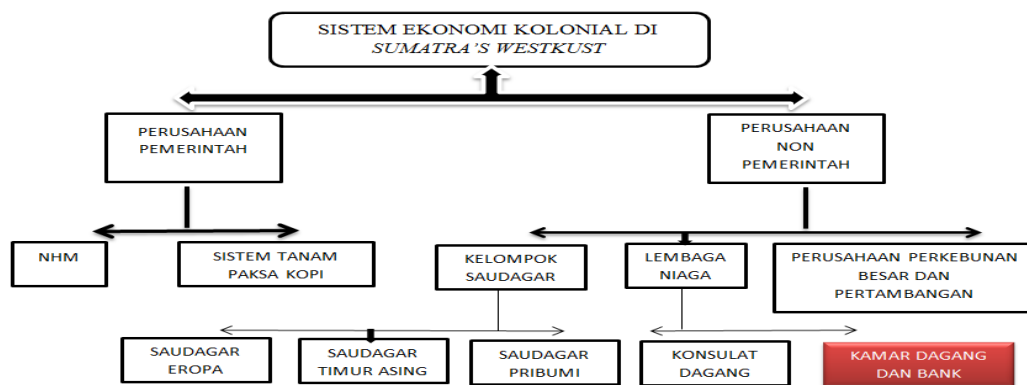
Alasan kedua, untuk wilayah Jawa sudah ada tiga *Kamer van Koophandel en Nijverheid* serupa, yaitu di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tiga kota serangkai ini persis terletak segaris kota-kota pesisir pantai utara Jawa. Artinya adalah kawasan strategis di pantai utara sudah diikat dengan simpul-simpul jaringan bisnis, sedangkan di Sumatera kawasan pantai timurnya masih menjadi lahan percaturan kepentingan bangsa lain. Karena Jawa sudah merasa dikuasai dengan adanya simpul-simpul jaringan bisnis ini, maka untuk mengamankan Sumatera khususnya di pantai barat maka dipilihlah Padang sebagai perwakilannya. Oleh sebab itu dalam laporan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia* disebut bahwa berdirinya *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena pemerintah kolonial takut kawasan ini jatuh ke tangan bangsa lain. Hal ini juga berlaku untuk *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar*. Tujuannya untuk mengamankan simpul bisnis terutama untuk Indonesia bagian timur.

Alasan ketiga, Padang menjadi daerah unggul dan terdepan di luar Jawa. Hal ini sejalan dengan kebangkitan ekonomi di Pantai Barat Sumatera sejak tahun 1850-an menyebabkan daerah ini dianggap pemerintah sebagai daerah terdepan di kawasan *Buitenbezittingen*. Pemerintah Hindia Belanda membagi daerah kekuasaannya menjadi dua penamaan yaitu Pulau Jawa (Java) dan daerah luar Jawa (*Buitenbezittingen*) yang mencakup Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Adapun beberapa pusat-pusat perdagangan lama seperti Aceh, Medan, Palembang, atau juga kerajaan lokal di Riau tidak terpilih menjadi pusat *Kamer van Koophandel en Nijverheid*. Alasannya karena Aceh posisinya terlalu diujung Sumatera, dan kawasannya belum sepenuhnya ditaklukan, sedangkan Medan dan Palembang belum berarti apa-apa dibanding menggeliatnya perekonomian di Padang. Untuk wilayah Riau kegiatan bisnisnya seperti Ekspor Impor dimanfaatkan melalui *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* tahun 1930-an. Pekanbaru dijadikan rute tambahan untuk ekspor impor, seperti perdagangan tembakau, gambir di Selat Malaka, juga rute impor barang-barang dari Jepang.

Alasan keempat, persaingan bisnis di Padang jauh lebih menggeliat. Hal ini karena Padang ditempati oleh orang Minangkabau, Belanda, Cina, Arab, atau Timur Asing lainnya yang memang bertungkus lumus dengan bisnis. Padang menjadi tempat pertama dibukanya *De Javasche Bank* di luar Jawa, padahal sesuai nama dan undang-undangnya Bank Jawa hanya ada di Jawa, tetapi karena kepentingan bisnis undang-undangnya diubah, sehingga berkat lobi-lobi itu *De Javasche Bank* berhasil dibuka di Padang. Selain *De Javasche Bank*, *Nederlands Handeel Maatschappij* (NHM) Padang dan satu-satunya di luar Jawa. Geliat dan persaingan bisnis ini yang membuat para pengusaha indo eropa *keukeh* mendirikan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*, lalu disahkan melalui surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1863.

Posisi dan Fungsi

Untuk melihat bagaimana posisi atau kedudukan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dalam struktur ekonomi kolonial di Sumatra Barat berikut adalah bagan sistem ekonomi kolonial di *Sumatra's Westkust*.



Bagan 1 : Struktur Ekonomi Kolonial di Sumatra Barat

Sumber : disarikan dari buku Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra*, Yogyakarta : Ombak, 2007.

Perokonomian kolonial Belanda di pantai barat atau di *Sumatra's Westkust* terdiri dari dua elemen penting. Pertama, sistem ekonomi perusahaan pemerintah kolonial. Kedua sistem ekonomi perusahaan non pemerintah. Sistem ekonomi pemerintah kolonial terdiri atas dua yaitu *Nederlands Handeel Maatschappij* (NHM) dan sistem tanam paksa kopi.

Perang Paderi tidak hanya dimenangkan oleh Belanda dalam artian kemenangan atas daerah Minangkabau, akan tetapi kemenangan Belanda dalam perang Paderi juga berarti kemenangan atas penghancuran potensi niaga Kaum Paderi. Kaum Paderi yang terkenal ulet dalam berniaga memakai pola perdagangan bebas, sehingga menjadi suatu ancaman bagi pemerintah kolonial. Upaya-upaya pemerintah kolonial seperti mengaktifkan kompanye militer, mengalihkan pusat perdagangan dari pedalaman ke pantai barat, serta menutup akses niaga dari pantai barat ke kawasan timur adalah upaya efektif dalam menghancurkan potensi niaga Kaum Paderi. Tumbangnya benteng Paderi terakhir di Bonjol tahun 1837 adalah suatu pukulan telak yang berakibat mundurnya aktivitas niaga Kaum Paderi.

Setelah kemenangan Pemerintah Hindia Belanda atas Perang Paderi pemerintah memiliki hak monopoli atas daerah kekuasaannya ini. Selain itu dalam beberapa literatur ada yang menyebut pemerintah memperkenalkan perdagangan bebas pada kawasan ini, seperti Van Swieten dalam memori serah terimanya menyebut bahwa setelah Perang Paderi politik ekonomi pemerintah di Pantai Barat menjadi perdagangan bebas. Akan tetapi ada juga yang menyebut perdagangan semi bebas atau perdagangan bebas terbatas. Gusti Asnan lebih cenderung menamakan fase ini dengan perdagangan (semi) bebas. Hal ini karena adanya campur tangan atau kontrol pemerintah pada perusahaan atau kegiatan ekonomi yang di dukung oleh pemerintah. Perdagangan bebas atau bebas terbatas maksudnya adalah para saudagar non pemerintah diberikan izin untuk memperjualbelikan beberapa barang yang dihasilkan dari kepulauan Indonesia. Adapun barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan walaupun dihasilkan di Indonesia seperti senjata dan amunisi. Untuk menarik keuntungan dari perdagangan bebas atau bebas terbatas ini pemerintah menarik pajak ekspor-impor, pajak daerah, pajak pelabuhan, pajak pasar serta uang tambat pada para pelaku niaga. (ANRI SWK 151/1)

Nederlands Handel Maatschappij (NHM) di Padang hadir dari realita monopoli dan perdagangan bebas atau semi bebas, dan juga keterbatasan modal dan tenaga kerja pemerintah Hindia Belanda pada dua dekade pertama setelah berhasil menaklukkan Paderi di kawasan ini. Oleh sebab itu Pemerintah Hindia Belanda menandatangani kontrak dengan

NHM, selain juga untuk meraup keuntungan kegiatan perdagangan dan pelayaran di kawasan ini. (*Mansvelt nt;194, Kraus 1984, hal.148*). NHM membuka agennya di Padang tahun 1826 dan satu-satunya agen di luar Jawa.

Tujuan berdirinya NHM berdasarkan surat keputusan Raja Belanda no 163 tanggal 29 Maret 1824 adalah untuk meningkatkan perdagangan, pelayaran, industri perkapalan, perikanan dan pertanian. Selain itu tujuannya juga untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, serta gudang-gudang dengan harapan memberikan keuntungan yang besar bagi negara. NHM di Padang diberikan hak istimewa dalam memonopoli perdagangan dan disebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Berbagai kewenangan diberikan pada NHM sehingga mencapai puncak tahun 1840-an. Nilai ekspor-impor NHM Padang yang sangat tinggi membuktikan bahwa NHM memang berhasil sebagai perusahaan “anak emas” pemerintah kolonial.

Beberapa tahun setelah fase puncak NHM, fase kemunduran juga langsung menyertainya. Kredit yang diberikan dalam jumlah yang sangat besar pada para pedagang ternyata pembayarannya macet dan tidak mampu mengembalikannya. Penjualan kopi juga merugi sehingga menimbulkan krisis dalam badan NHM. Akibatnya adalah pemerintah mengurangi dukungannya pada NHM Padang. Semua kantor cabang pembantu NHM ditutup satu persatu. Munculnya saingan baru dalam kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh rumah dagang mengakibatkan NHM Padang dinilai tidak berarti lagi dan dijuluki sebagai pos yang merugi (*verliest post*). Satu-satunya lini bisnis NHM yang memberikan keuntungan adalah sistem tanam paksa kopi, itu pun pada tahap awalnya saja. Meskipun berhasil dalam produksi kopi tapi tetap tidak dapat menyangga kegagalan NHM dalam lini yang lain.

Sistem ekonomi non pemerintah kolonial terbagi pula atas tiga bagian. Pertama, kelompok-kelompok saudagar. Kedua, lembaga-lembaga niaga. Terakhir adalah perkebunan besar dan pertambangan. Kelompok-kelompok saudagar dibagi pula atas tiga bagian yaitu, saudagar Eropa, saudagar timur asing dan saudagar pribumi.

Kelompok saudagar Eropa terdiri dari terdiri bangsa Inggris, Belanda, Jerman yang sudah lama tinggal atau menetap di kawasan pantai barat. Kelompok ini biasa dikenal dengan *Indische Nederlander*. Orang-orang keturunan Indo juga terhimpun dalam kelompok ini. Saudagar Inggris yang tinggal di pantai barat ini umumnya adalah mantan pekerja EIC, mereka bergerak dalam bidang ekspor-impor. Selain sebagai saudagar, orang Inggris yang tinggal di kawasan ini juga sebagai *spoortanemers* dan *havenmeester*. *Spoortanemers* adalah jabatan yang diberikan oleh pemerintah kolonial dalam mengoperasikan sarana angkutan untuk membawa orang dan barang ke dan berbagai kota di kawasan pantai barat. *Havenmeester* adalah kepala pelabuhan di Padang. Orang-orang Inggris di pantai barat juga memiliki kapal (*kusvaarder* atau sarana pelayaran pantai) sehingga mendukung pelayaran antar samudera terutama pantai barat dengan India. (ARA NHM 9465). Orang Belanda juga tergabung dalam kelompok saudagar Eropa di pantai barat. Umumnya orang-orang Belanda ini adalah mantan pegawai VOC. (Gusti Asnan, 2007: 111).

Saudagar-saudagar Eropa di pantai barat menjalankan bentuk usaha yang dikenal dengan rumah dagang (*handelhuizen*). Gusti Asnan menyebut dalam bukunya ada dua rumah dagang yang tercatat di kawasan pantai barat tahun 1854. Kemudian, pada tahun 1860-an jumlahnya bertambah menjadi sembilan buah rumah dagang. Akhir tahun 1880-an jumlahnya berkisar menjadi tiga belas buah rumah dagang. Pada dasawarsa pertama awal abad kedua puluh jumlahnya menurun menjadi 10 buah rumah dagang. Hal ini karena kebangkrutan. (*Regeeringsalmanak* 1868: 509, *Handbook voor Cultuur* 1888: 427, 1889: 428, 1890: 419, 1900: 530-531).

Aktivitas rumah dagang ini memang fokusnya adalah pada ekspor-impor. Barang-barang yang diekspor yaitu hasil hutan dan tanaman perdagangan. Rumah dagang di pantai barat adalah pembeli utama kopi pemerintah dan kopi hasil perkebunan besar. Adapun barang-barang impor berasal dari Penang, Singapura, India dan Eropa. Jenis komoditas impor yang didatangkan yaitu kain, minyak, kertas, porselen, barang-barang dari besi, perunggu, pecah belah, berbagai macam minuman, makanan dan alat-alat rumah tangga. (*Overzicht van den Handel en Scheepvaart 1847-1870 ; Statiestiek van den Handel, de Scheepvaart 1871-1890 ; Sumatra Courant, 14 Maart 1868 ; Sumatra Courant, 4 April 1874*). Rumah dagang juga melakukan pelayanan jasa pengiriman barang dari pantai barat ke Jawa, India maupun Eropa. Serta juga agen dari perusahaan-perusahaan asing mempunyai kantor pusat di Jawa dan di luar negeri. (*Sumatra Courant, 19 Desember 1868*.)

Kelompok kedua adalah saudagar timur asing (*vreemde oosterlingen*). Para saudagar ini terdiri dari pedagang Cina, India dan Arab. Para pedagang Cina di pantai barat ada yang bermukim sudah sejak lama, tapi ada juga yang dari Pulau Penang, Singapura dan Jawa. Saudagar Cina dalam aktivitas perdagangannya membuat kongsi dagang yang dikenal dengan istilah *verbond* atau *handelvereniging*. Para pedagang Cina dalam buku Gusti Asnan disebut sebagai pedagang perantara antara saudagar kecil pribumi dengan sudagar besar Eropa. Lalu pada awal abad ke-20, beberapa dari saudagar Cina berhasil memiliki rumah dagang yang bergerak dalam kegiatan ekspor-impor.

Saudagar-saudagar Cina di pantai barat mendapatkan banyak kemudahan dari pemerintah. Seperti hak *pachter* (penarikan) berbagai macam pajak, hak atas penjualan candu, hak mendistribusikan garam, pengelolaan sarang burung layang-layang, dan *transportannemer*, serta kemudahan dalam mendapatkan kredit dari pemerintah juga NHM. Saudagar India dan Arab juga ada yang sudah lama bermukim di pantai barat, tetapi ada juga yang datang langsung dari India dan juga saudagar arab yang datang dari Batavia. Berbeda dengan saudagar Cina, saudagar India dan Arab lebih aktif dalam perdagangan kain. Jumlah mereka juga sedikit dibanding saudagar Cina.

Ketiga adalah kelompok saudagar pribumi. Para pedagang yang masuk dalam kelompok ini adalah Minangkabau, Aceh, Batak, Jawa dan Bugis. Saudagar Minangkabau dan Batak telah dikenal aktif berdagang di kawasan ini sejak berabad-abad sebelum kedatangan orang barat. (Cartesao, 1944: 160-161). Para pedagang pribumi ini bertindak sebagai pedagang perantara antara saudagar pribumi yang lebih kecil dengan saudagar besar Eropa. Lalu pada paruh kedua abad ke-19 peran sebagai pedagang perantara digantikan oleh kelompok saudagar lain, terutama Cina. Gusti Asnan menyebut pergeseran ini karena kalah saingnya pedagang pribumi dengan pedagang timur asing, disebabkan oleh pola pribumi berdagang nyaris tanpa modal. Gejala mundurnya peranan saudagar pribumi sebagai saudagar perantara terlihat sejak awal tahun 1860-an. (ANRI Swk 127/23).

Saudagar pribumi umumnya bergelut dalam bidang pertama pembuatan tembikar. Kedua, ukiran kayu. Ketiga, kerajinan emas dan perak. Keempat, pembuatan senjata tajam. Kelima, pembuatan tikar pandan dan rotan. Keenam, pembuatan minyak kelapa. Ketujuh, penggilingan padi (kincir air). Kedelapan, pertenunan kain serta tukang rumah. Terakhir adalah pembuatan perahu dan kapal. (Munnick, 1912: 395; *“De Inlandsch Nijverheid...”* 1894: 301; *Buddingh, 1867: 161*).

Sistem ekonomi non pemerintah yang kedua adalah lembaga-lembaga niaga. Lembaga ini terdiri dari dua bagian yaitu konsulat dagang dan kamar dagang serta bank. Konsulat dagang paling banyak menangani masalah administrasi perdagangan, yaitu perizinan berdagang juga izin berlabuh. Konsulat dagang juga menangani masalah

perhubungan antara saudagar asing yang datang dengan rumah dagang yang ada di kawasan pantai barat.

Negara-negara yang membuka konsulat dagangnya di kawasan ini adalah pertama, Amerika tahun 1864. Kedua, Prancis tahun 1866. Ketiga, Denmark tahun 1868. Keempat, Inggris tahun 1873. Kelima, Belgia tahun 1874. Keenam, Swedia dan Norwegia tahun 1874. Terakhir adalah negara Jerman dan Italia. Gusti Asnan menyebut dalam bukunya bahwa data mengenai tahun pasti pembukaan konsulat dagang Jerman dan Italia tidak ditemukan. Akan tetapi berita tentang kegiatan konsulat dagang Jerman dan Italia telah muncul dalam berbagai laporan pemerintah sejak tahun 1874.

Konsulat dagang ini tujuannya adalah memudahkan aktivitas perdagangan antara masing-masing negara yang diwakili dengan kawasan pantai barat, selain itu juga memberikan penilaian atau laporan perkembangan keadaan perekonomian daerah ini. Konsulat dagang Inggris dan Amerika adalah dua konsulat paling sibuk di pantai barat. Tercatat ada pertengahan tahun 1850an sampai awal abad kedua puluh terdapat 431 buah kapal Inggris dan 108 buah kapal Amerika yang mengunjungi kawasan ini. (*Overzicht van den Handel 1847-1870 dan Statistiek van den Handel 1871-1890* Gusti Asnan, 2007: 130).

Dekade terakhir abad ke-19 terjadi penurunan aktivitas konsulat dagang di Padang. Dua dekade pertama abad ke-20 jumlah konsulat dagang yang menutup kantornya di Padang semakin banyak lalu dipindahkan ke Medan. Alasannya adalah dunia niaga dan pelayaran pantai barat mulai menurun sedangkan di pantai timur terutama di *Sumatra's Oostkust* sangat bergairah. (Gusti Asnan, 2007: 132).

Bagian kedua lembaga-lembaga niaga adalah Kamar dagang dan bank. Posisi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* terdapat di sini, yaitu pada lembaga-lembaga niaga. *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* berdiri tahun 1863 berdasarkan surat keputusan pemerintah tanggal 29 Oktober. Tujuan dibukanya *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan kegiatan perdagangan dan pelayaran di pantai barat. *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* diharapkan bisa menjadi wadah para pengusaha untuk berperan serta memberikan kontribusi bagi dunia niaga pantai barat. Gusti Asnan dalam buku *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra* menyebut bahwa *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* adalah sebuah lembaga yang mewadahi para pengusaha terutama bangsa Eropa dan Cina, akan tetapi setelah melihat struktur kepengurusannya keterwakilan etnis Cina dalam struktur lembaga *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* sangat minim atau nyaris tidak ada.

Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang diharapkan menjadi partner Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan pantai barat sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan perdagangan, pelayaran dan ekonomi, tidak hanya di pantai barat, tetapi di Indonesia bagian barat. (*Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia over het Jaar*, 1853: 3). *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* berperan dalam mempengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan perdagangan dan pelayaran. Prestasi pertama *Kamer Van Koophandel en Nijverheid te Padang* pada tahun pertama adalah mampu melobi pemerintah agar dibukanya *De Javasche Bank* di Padang dan cabang pertama di luar Jawa setelah beberapa kali penolakan pemerintah pusat.

Beberapa kali usulan agar dibuka *De Javasche Bank* (DJB) di luar Jawa selalu ditolak pemerintah lantaran sesuai namanya dan ditegaskan juga dalam pasal 65 *Octrooi I* bahwa *De Javasche Bank* hanyaizinkan beroperasi di Pulau Jawa dan Madura. Pasal 35 *Octrooi* juga menegaskan bahwa uang kertas yang digunakan dalam transaksi bank yang berlaku di Jawa dan Madura.

Adanya keinginan memperluas wilayah operasi *De Javasche Bank* tetap menjadi agende petinggi DJB dan disambut baik oleh *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang*. Oleh sebab itu muncul keinginan untuk merubah isi pasal yang membatasi wilayah operasi dan peredaran uang kertas yang tidak hanya di Jawa dan Madura tapi juga berlaku di luar itu. Melalui pedebatan dan rapat antar pemegang saham dan lobi yang dilakukan dengan pemerintah akhirnya disetujui pembukaan DJB di luar Jawa. Hal ini ditegaskan dalam *Octrooi* ke empat serta dimuat dalam *Staatblad van de Nederlandsche Indie* no 98 tahun 1860. (Gusti Asnan, 2017: 89).

29 Agustus 1864 belum genap satu tahun setelah *Kamer Van Koophandel e Nijverheid te Padang* berdiri *De Javasche Bank* berhasil membuka cabangnya di Padang, sebagai cabang pertama di luar Jawa. Beberapa alasan penting dibukanya *De Javasche Bank* menurut Gusti Asnan di Padang adalah sebagai berikut : pertama, adanya usulan dari para pengusaha dan pelaku bisnis di Padang dan juga pemerintahan daerah yang sudah sejak lama menginginkan dibukanya DJB di kawasan ini, bahkan satu tahun setelah DJB berdiri di Batavia sudah diusulkan agar dibukanya DJB di Padang. Usulan ini didukung oleh pemerintah daerah di Sumatra Barat. Kedua, perkembangan ekonomi dan dunia niaga pantai barat Sumatra pada umumnya dan Padang pada khususnya cenderung meningkat dan bergairah. Hal ini karena banyak aktivitas ekspor impor di kawasan ini. Kebangkitan ekonomi di Pantai Barat Sumatera sejak tahun 1850-an menyebabkan daerah ini dianggap pemerintah sebagai daerah terdepan di kawasan *Buitenbezittingen* (A. E. Crockwit 1866: 278 Gusti Asnan, 2017: 96).

Beberapa peran penting *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah pembangunan dan perbaikan Reede Padang, juga lobi kebijakan atas wajib singgahnya di Pelabuhan Padang bagi kapal-kapal antar samudera dalam pelayaran mereka antara Batavia dan Eropa.(Gusti Asnan, 2007: 133). *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* seperti yang dinyatakan di awal juga berperan dalam pembuatan jalan kereta api dalam mengupayakan pengangkutan tambang batu bara Ombilin, serta pembangunan pelabuhan Emmahaven seperti dalam laporan tahunannya.

Bank juga menjadi bagian dalam struktur ekonomi non pemerintah di pantai barat. Lembaga-lembaga keuangan atau bank ini menurut Gusti Asnan mulai muncul pada kurun waktu 1850an. Di mulai dari *De Javasche Bank* tahun 1864, lalu *Padangsche Spaarbank* tahun 1870an. Lalu menyusul *Bataviasche Bank*. *Nederlandsche Indische Handelsbank* juga mempunyai kantor korespondenya di Padang. Beberapa kantor koresponden bank lainnya tahun 1880an juga ada di kawasan ini seperti *Chartered Bank of India, Australia and Cina* ; *Chartered Mercantile Bank of India, London, and Cina*, serta *Hongkong and Shanghai Banking Corporation*. (*Handboek voor Cultuur....1890*: 419, Gusti Asnan: 134).

Bagian terakhir dari struktur ekonomi non pemerintah di Sumatra Barat adalah perkebunan besar dan pertambangan yang dimiliki oleh pemilik modal atau swasta. Setelah penghapusan tanam paksa, para pemilik modal yang terdiri dari kelompok masyarakat Eropa, Timur Asing dan Pribumi menjalankan usaha perkebunan besar dan pertambangan di Sumatra Barat. Gusti Asnan menyebut perkebunan besar pertama kali dibuka di Sumatera Barat tahun 1877. Hingga tahun 1907 sudah terdapat 57 perkebunan besar di daerah ini. Hampir semua perkebunan besar ditanami tanaman perdagangan seperti kopi. Perkebunan yang dibuka setelah itu ditanami pula tanaman perdagangan seperti kelapa dan getah.(*Dep. van Binnenlandsch Bestuur, 1918*, hal.332 Gusti Asnan, 2007, hal.140). Ada juga beberapa pertambangan yang dibuka di daerah ini, yaitu dua pertambangan emas (*Mijnbouw Maatschappij Sumatra*) di Salido dan Supayang. Penjelasan mengenai struktur

ekonomi pemerintah dan non pemerintah di Sumatra diharapkan mampu menghantarkan pemahaman tentang posisi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*.

Manajemen *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*.

Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah lembaga bagi pengusaha swasta asing yang bergerak dalam berbagai lini bisnis. Lembaga ini adalah wadah bagi perkumpulan pengusaha Indo-Eropa yang menetap di Padang, maka pengurusnya adalah pengusaha itu sendiri. Banyak bidang-bidang usaha yang digeluti oleh para pengusaha *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dan paling menonjol adalah bidang ekspor-impor. Selain itu juga ada bidang transportasi, pertambangan, perusahaan pengadaan jalan untuk ternak, perusahaan budidaya, bidang usaha kereta api, tambang ombilin, pengusaha perluasan jalan, irigasi, sanitasi, perusahaan pengkreditan rakyat, perusahaan pekerjaan pelabuhan, dan lain-lain.

Dalam bidang ekspor-impor *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* hanya menjembatani kepentingan-kepentingan pengusaha dengan pemerintah kolonial atau pihak lainnya. Artinya adalah *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* tidak melakukan ekspor impor secara langsung, yang melakukan ekspor impor tersebut adalah para pengusahanya dengan perusahaannya masing-masing. Ada beberapa perusahaan ekspor impor yang ada di Padang, seperti Van Houten Steffen & Co., Haacke & Co., Internatio, Borsumij, Geo-Wehry, Gunzel & Schumacher, Jocabson van den Berg. Di antara perusahaan-perusahaan itu, ada yang membidangi perdagangan ekspor saja. Ada pula yang membidangi perdagangan impor saja, tetapi ada juga yang melakukan kedua-duanya, yaitu ekspor impor.

Pengelolaan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* sepanjang periode 1907-1940 umumnya dikelola oleh pengusaha-pengusaha Eropa terutama orang Indo-Belanda yang menetap di Padang. Berikut adalah struktur kepengurusan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* tahun 1907.

Tabel 1. Struktur Pengurus 1908-1912

Nama	Ditunjuk (<i>benoemd</i>)	Diangkat kembali (<i>herbenoemd</i>) sampai masa akhir jabatan	
H. J. P. Haacke	24 Oktober 1906	31 Desember 1908	1 Januari 1912
L. Stibbe	6 Maret 1904	31 Desember 1908	1 Januari 1912
J. C Bijleveld	18 Januari 1907		1 Januari 1910
Z H Kamerling	18 Februari 1907		1 Januari 1910
W. H. G. Herklots	9 September 1907		1 Januari 1911
G W. Ungerer	Sektraris		

Sumber : *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* tahun 1907, *Gouvernements Besluit* no 15, 31 Desember 1908.

Istilah yang digunakan untuk pengangkatan pengurus atau direksi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah *benoemd* dan *herbenoemd*. *Benoemd* artinya adalah ditunjuk. *Herbenoemd* berarti ditunjuk kembali atau diangkat kembali. Dari dua istilah ini dapat ditarik penfasiran bahwa pengangkatan kepengurusan *Kamer van*

Koophandel en Nijverheid te Padang pada tahun 1907 berdasarkan laporan tahunannya berdasarkan penunjukkan dari anggota pengusaha itu sendiri.

Pengurusan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* juga memiliki batas masa akhir jabatan. Contohnya H. J. P. Hacke ditunjuk sebagai pengeloa *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* pada tanggal 24 Oktober 1906. Lalu ia diangkat kembali sebagai pengelola atau dewan direksi untuk periode 31 Desember 1908 sampai 1 Januari 1902. L. Stibbe juga ditunjuk pada periode *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* sebelumnya 6 Maret 1904. Pengurus lain J. C Bijleveld ditunjuk sebagai pengurus 18 Januari 1907, Z H Kamerling ditunjuk sebagai pengelola pada 18 Februari 1907.

Dari nama-nama yang tercatat sebagai pengurus *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* tahun 1907, bisa dipastikan tidak ada nama pengusaha Cina yang menjabat sebagai petinggi di lembaga itu. Artinya adalah keterwakilan etnis Cina dalam lembaga pengusaha setingkat petinggi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* masih sangat minim. Pengusaha Eropa tanpaknya memainkan peranan penting di dalam *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*, hal ini karena semua pengurus intinya adalah orang Eropa khususnya Belanda.

Bidang Usaha *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*.

Para pengusaha kolonial di Padang memiliki bidang usaha yang beragam. Hal ini terlihat dari banyaknya bidang usaha yang mereka kembangkan. Hampir semua lini yang bernilai bisnis digeluti. Bahkan praktik “gurita bisnis” sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kolonial ini di Padang. Ada pengusaha yang perusahaannya bergerak di bidang ekspor impor, tapi disisi lain juga dia memiliki perusahaan lain yang bergerak dalam bidang pertambangan, budidaya tanaman, ekspedisi dan lain. Seperti Haacke yang memiliki perusahaan ekspor tetapi juga memiliki bisnis bongkar muat barang dilautan lepas untuk dibawa ke dermaga. Haacke juga memiliki perkebunan kopi dan diversifikasi dengan tanaman kayu manis dan karet. Dia juga menjadi agen Mercantile Bank of India, London dan Cina, agen the Manchester Fire Insurance Company, agen the New York Board of Undewriters, agen the Young Tze Marine Insurance Company, dan agen konsuler untuk Amerika. (Colombijn, 1994: 102).

Kamer van Koophandel di Padang melaporkan berbagai bidang usaha bisnisnya seperti impor, ekspor, transportasi, pertambangan, bank dan mata uang, pelayaran, pajak, pengiriman, penambangan batu bara, pengadaan jalan untuk ternak, budidaya tanaman, bidang pertambangan swasta, bidang kereta api. Selanjutnya, pekerjaan jalur lalu lintas dan pekerjaan umum lainnya, perluasan jaringan jalan, usaha perbaikan jalan, usaha pengairan, usaha pekerjaan sanitasi. Selanjutnya industri semen, sistem pengkreditan rakyat, pekerjaan pelabuhan, Bidang usaha lainnya, asuransi, pos telegraf dan layanan telepon, industri, pasar tenaga kerja, layanan informasi pertanian, peternakan, jalur kereta api, pos telegraf dan teknik telegraf dan sistem telepon. (*Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1927*)

Lobi-lobi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*.

a. Lobi Amandemen UU Ordonansi Pertambangan pada Gubernur Jendral.

Dalam surat tertanggal 22 Agustus 1908, pimpinan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* berusaha melobi Gubernur Jendral Hindia Belanda di Buitenzorg. Petinggi lembaga menyebut bahwa perdagangan kawasan pantai barat mengalami kemandekan. Hal ini disebabkan oleh masa-masa sulit yang dialaminya. Akibatnya adalah para pengusaha mengalami kerugian yang besar serta stagnansi yang signifikan. Kegiatan

ekspor-impor dalam beberapa tahun terakhir di kawasan ini juga tidak mengalami kemajuan yang berarti. (*Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1908*: 1)

Fakta yang disampaikan oleh petinggi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah pindahnya masyarakat kawasan ini dalam jumlah yang signifikan ke Pantai Timur, sedangkan jumlah penduduk di daerah ini tidak terlalu padat. Tujuan mereka meninggalkan pantai barat adalah untuk mencari penghidupan di pantai timur. Pajak yang diterapkan oleh pemerintah menjadi alasan juga atas perpindahan masyarakat pantai barat ke pantai timur.

Oleh sebab itu *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* mengharapkan pemerintah untuk melakukan segala upaya agar wilayah ini menjadi makmur, terutama upaya terhadap pengembangan sumber daya alamnya yang besar. Pimpinan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* meminta agar pemerintah mengambil langkah serius untuk meningkatkan modal Belanda dan Eropa serta dalam perusahaan pertambangan di Sumatra's Westkust. Selain itu *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* mendorong agar terbentuknya perusahaan-perusahaan baru di kawasan ini. Hal ini karena berlimpahnya sumber daya alam di kawasan West Sumatera.

Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang juga meminta pemerintah untuk mengundang semua pegawai negeri sipil, pemilik modal untuk berkerjasama. Adapun langkah yang disarankan lembaga ini adalah mengubah undang-undang pertambangan yang menjadi hambatan sebelumnya (ordonansi pertambangan). *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* meminta menghapus beberapa pasal yaitu pasal 176-192. Pasal-pasal tersebut dianggap menghambat kegiatan bisnisnya di pantai barat.

Surat itu dibalas Hulshof Pol sebagai sekretaris I Gubernur Jendral. Atas perintah Gubernur Jendral, Hulshof menyebutkan bahwa belum bisa mengabulkan permintaan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* untuk mengamandemen Ordonansi Pertambangan. Hal ini karena Pemerintah Hindia Belanda belum menemukan alasan yang tepat agar Ordonansi Pertambangan diubah (*De Iste Gouverments Secretaris no 1211, Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1908*: 5).

b. Lobi Perbaikan Pelabuhan Emmahaven.

Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang meminta izin pada Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk menggunakan dana yang telah diajukan oleh kepala pelabuhan dalam memperbaiki pelabuhan Emmahaven. Dana yang diajukan oleh kepala pelabuhan pada pemerintah sebelumnya adalah untuk pembangunan dermaga kelima. Oleh sebab itu untuk kepentingan perdagangan dan ekspedisi diperlukan ruang yang besar untuk penyimpanan barang serta pencahayaan di pelabuhan. *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* meminta agar dibangunnya hanggar supaya berguna untuk ruang penyimpanan. Adapun pencahayaan dibutuhkan karena untuk mengantisipasi pencurian barang-barang ekspor-impor (*Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* no 24, 10 Maret 1911)

Pada surat sebelumnya *Kamer van Koophandel* menjelaskan pada kepala pelabuhan Emmahaven bahwa terjadi peningkatan kebutuhan akan minyak. Kapasitas yang diberikan oleh pelabuhan terlalu kecil, sehingga minyak yang dikirim juga terbatas. Kapasitas awalnya adalah 1000 liter per kapal. (*Bijlage VIII a, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1910*) Surat itu dibalas oleh kepala pelabuhan E.A. Kuchlin. Dia menyebut bahwa pihak pelabuhan akan merubah poin C (1) dari 1000 liter menjadi 2000 liter. (*verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1910*: 65). Usaha lobi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* berhasil dalam hal ini.

Untuk menjaga keamanan barang-barang pengusaha *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* juga melakukan koordinasi dengan *Gouverneur van Sumastras's Weskust*. Kasusnya adalah ketika batu bara Ombilin disimpan di Emmahaven oleh *Staatsporwege*. Tempat penyimpanan itu adalah untuk barang-barang komersialnya *Kamer van Koophandel*. Lalu surat dilayangkan pada *Gouverneur van Sumastras's Weskust* sebagai bentuk protes karena dapat mengakibatkan kebakaran pada barang-barang komersil tersebut. (*Bijlage IX a No 54, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1911: 51*).

Surat itu mendapat balasan dari P. Lesueur sebagai Wd. *Gouverneur van Sumastras's Weskust*. P. Lesueur mengatakan bahwa penyimpanan batu bara di pelabuhan itu terjadi karena kesalah pahaman. Hal itu tidak akan terulang kembali. (*Bijlage IX b No 7195, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1911: 52*). Berbagai upaya keamanan, serta hal hal yang dapat mengancam bisnis pengusaha di *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dilakukan. Tampaknya lembaga ini sangat vokal dalam menyuarakan berbagai kepentingan dan tujuan mereka.

c. Lobi mempertahankan *American Consular Service*.

Awal tahun 1916 sebuah badan konsulat Amerika ditutup di Padang. Penutupan itu menimbulkan reaksi dari *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* pada *American Consular Service*. *Kamer van Koophandel* meminta agar Layanan Konsulat Amerika agar tidak ditutup di Padang. Permintaan agar layanan konsulat Amerika tetap dipertahankan di Padang disampaikan melalui surat lobi. Surat itu dibalas oleh konsulat Amerika di Batavia. Penutupan ini merupakan intruksi dari Departemen Luar Negeri di Washington DC. Konsul Amerika di Batavia menyatakan tidak punya kewenangan untuk bertindak mempertahankan *American Consular Service* di Padang. (*Bijlage Va, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1916: 44*).

Kamar dagang Belanda di Amerika (*The Netherland Chamber of Commerce in America*) diminta oleh *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* untuk memprotes secara keras mengapa *American Consular Service* ditutup di Padang. Hal ini dapat mempengaruhi sistem ekspor impor barang dari Padang ke New York, Amerika atau juga sebaliknya. (*Bijlage Vb, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1916: 45*). *American Consular Service* tampaknya sangat penting bagi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* juga bagi Kamar dagang Belanda di Amerika. Kamar Dagang Belanda di Amerika juga meminta *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* untuk mengajak perusahaan impor lain untuk melancarkan aksi protesnya atas penutupan itu.

Dalam surat protes yang dilayangkan oleh *The Netherland Chamber of Commerce in America* kepada Robert Lansing, sebagai sekretaris negara di Washington D.C tanggal 3 Januari 1916, menyebutkan bahwa *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* melalui *The Netherland Chamber of Commerce in America* meminta agar *American Consular Service* tidak ditutup di Padang.

Alasan mengapa *American Consular Service* tidak boleh ditutup di Padang adalah karena memakan biaya dan usaha yang besar bagi eksportir di Padang juga kegiatan importir di Amerika Serikat untuk masuk ke Padang harus melalui Batavia. Padang merupakan pelabuhan terakhir di Hindia Belanda untuk menuju negara-negara di Eropa. Semua kargo yang dikirim dari Padang langsung ke Amerika. Jika *American Consular Service* ditutup di Padang maka faktur konsuler pertama-tama harus dikirim ke Batavia. Keterlambatan dalam memperoleh faktur atau tagihan konsuler akan mengakibatkan keterlambatan dalam negosiasi pengirimannya. Oleh sebab itu dibutuhkan dokumen

lengkap pengiriman. Dokumen lengkap akan tiba beberapa minggu setelah kedatangan kapal uap, dan akan memerlukan obligasi kepada otoritas bea cukai, setelah itu importir baru diizinkan untuk melakukan hal yang sama. Cara-cara seperti ini membutuhkan biaya tambahan dan berbagai kesulitan bagi *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang*. (*Bijlage Vc, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1916: 47*).

Pentingnya perdagangan antara Padang dan Amerika Serikat adalah cara melobi agar *American Consular Service* tidak ditutup. Pertumbuhan perdagangan Padang dan Amerika meningkat setiap tahunnya. Angka ekspor dari pelabuhan Padang ke Amerika Serikat terus menerus naik. Berikut adalah tabel nilai ekspor pelabuhan Padang ke Amerika Serikat tahun 1912.

Tabel 2. Nilai Ekspor Padang ke Amerika Serikat tahun 1912

Komoditas		Nilai Ekspor
Cassia		\$ 148.877,-
Kopi		\$ 615.825,-
Kacang tanah		\$ 4.249,-
Getah terdiri dari :	a. Gum Benjamin / Kemenyam	\$ 8.364,-
	b. Dammar	\$ 3.823,-
Rotan		\$ 64.764,-
Karet		\$ 32.004,-
Rempah :	Mace	\$ 53.726,-
	Nutmegs (sejenis buah pala)	\$ 37.544,-
Lainnya		\$ 521,-
Total		\$ 964.717,-

Sumber: *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1916*.

Surat protes penutupan yang dikirim tanggal 3 Januari 1916 oleh *The Netherland Chamber of Commerce in America* dibalas oleh pemerintah Amerika Serikat. Isi dari balasannya adalah penutupan *American Consular Service* di Padang itu berdasarkan laporan Konsul Jendral Amerika yang berkunjung ke Padang. *American Consular Service* ditutup di Padang sejalan dengan kebijakan departemen, yang menutup seluruh agensi konsuler Amerika. Penutupan ini diharapkan tidak menghambat kegiatan ekspor barang ke Amerika Serikat. Surat itu juga menyebutkan bahwa penutupan *American Consular Service* tidak akan mempersulit pengiriman barang dari Padang ke Amerika Serikat.

Adapun cara yang ditawarkan untuk pengiriman barang tanpa *American Consular Service* Padang adalah pengiriman barang dari Padang dapat memiliki faktur konsuler yang disertifikasi di Batavia. Faktur amplop yang berstempel yang disertifikasi yang ditujukan kepada penerima bisa dikirimkan duplikatnya oleh konsul Amerika di Batavia. Ini didapat setelah *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* mengurusnya melalui pengiriman ke kantor konsulat Amerika terlebih dahulu untuk disertifikasi. Konsul Jendral Amerika mempertimbangkan bahwa faktur akan tiba sepuluh hingga dua puluh hari sebelum penerimaan barang dagangan. Sehingga tidak menghambat kegiatan ekspor impor dari Padang ke Amerika atau sebaliknya. (*Bijlage Ve, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1916: 50*).

Surat balasan dari *Director of Consular Service* Amerika Serikat itu dibalas lagi oleh *The Netherland Chamber of Commerce in America*. *The Netherland Chamber of Commerce in America* menyebut solusi yang diberikan konsul untuk meneruskan faktur konsuler langsung ke penerima barang itu dianggap tidak praktis. Karena dokumen ini diperlukan

lagi di Padang untuk dilampirkan kepada bankir yang berwenang di pelabuhan. Kalau dokumen itu tidak ada maka akan terjadi penundaan pengiriman. Dalam surat balasan itu lagi *The Netherland Chamber of Commerce in America* tetap meminta agar *American Consular Service* tetap dibuka setidaknya selama perang berlangsung.

Rute perjalanan dan jarak tempuh dari Padang ke Amerika Serikat adalah 44 hari. Sedangkan jika melalui Batavia itu memakan waktu 49 hari ditambah lagi resiko keterlambatan di Pelabuhan Batavia, Singapura, Belanda, Inggris, Prancis atau rute lainnya setelah itu. Hal ini dapat menghambat barang dan dokumen yang dibutuhkan untuk sampai ke penerima. Sedangkan pengiriman barang dengan adanya *American Consular Service* di Padang, pengiriman dari Padang ke New York tidak diragukan lagi cepat sampai barang dan dokumennya. (*Bijlage Vf, verslag van Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang 1916: 54*).

KESIMPULAN

Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang adalah asosiasi atau wadah perkumpulan para pengusaha khususnya Indo-Belanda di Padang. Munculnya *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* tidak dapat dilepaskan dari adanya usaha pemerintah kolonial mengintegrasikan wilayah-wilayah luar Jawa dengan Jawa. Upaya pengintegrasian ini melalui pembukaan dua jalur perdagangan baru, Batavia-Padang dan Batavia-Makassar tahun 1852. Sejak tahun 1850-an Pemerintah kolonial menganggap Padang sebagai daerah terdepan di kawasan *Buitenbezittingen*. Bangkitnya gairah bisnis dan usaha di Padang melahirkan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* melalui surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Oktober 1863. Dalam laporan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia* disebut bahwa berdirinya *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan kegiatan perdagangan dan pelayaran di Pantai Barat Sumatera. *Kamer van Koophandel en Nijverheid* ada dan berperan dalam struktur ekonomi kolonial. Adapun bentuk-bentuk kehadiran dan peran *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* sepanjang periode 1907-1940 adalah terbagi dalam beberapa bidang. Diantaranya yang paling menonjol adalah ekspor, impor, kemudian pelayaran, ekspedisi atau pengiriman barang, bank dan mata uang, pinjaman atau pengkreditan, asuransi, perusahaan perbaikan jalan, pekerjaan sanitasi, irigasi, usaha kereta api, usaha tambang batu bara, perusahaan perkebunan, pertambangan swasta, industri semen dan masih banyak lagi. Kehadiran *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dalam simpul-simpul bisnis ini terlihat langsung dan tidak langsung. Laporan-laporan tahunan *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dapat membantu melihat sejauh mana lembaga ini hadir dalam struktur ekonomi kolonial.

ACKNOWLEDGEMENT

Artikel ini adalah bagian dari tesis dengan judul Peran *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dalam Struktur Ekonomi Kolonial, 1907-1940. Artikel ini adalah narasi pengantar dalam melihat peran lembaga ini dalam struktur ekonomi kolonial. Pada bagian tesis selanjutnya, fokusnya adalah ekspor impor sebagai bagian utama bidang usaha *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* dalam struktur ekonomi kolonial. Ada beberapa bagian yang dibahas yaitu tren ekspor impor, dinamika ekspor impor, iklim ekspor impor awal abad ke-20, tantangan ekspor impor pada Perang Dunia I, zaman emas dunia ekspor impor, tantangan ekspor impor menghadapi depresi ekonomi, terakhir pemulihan dan tantangan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI SWK127/23, Algemeen Verslag van Sumatra's Westkust, 1870.
- ANRI SWK 151/1, Memorie van Overgace J. Van Swieten.
- ARA NHM 9465,23a, Verslag betreffende de bevindingen in de Padandsche Bovenlanden door L.M. F Plate agent te Padang, 1834.
- ARA NHM 9467;39, Verslag van het Bezoek aan het Agentschap Padang door W. Poolman, 1847.
- Booth, Anne et. Al (ed.), (1988), Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta : LP3ES.
- Colombijn, Freek, (1994), Paco-paco Kota Padang Sejarah sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke Dua Puluh dan Penggunaan Ruang Kota, Leiden: Research School CNWS Leiden University.
- Dick, Howard, (2002), *The Emergence of National Economy an Economic History of Indonesia*, North America: University of Hawai'i Press.
- Gusti Asnan, (2007), Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, Yogyakarta: Ombak.
- _____, dkk., (2017), *Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peranan Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*, Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Handboek voor Cultuur 1890* Gusti Asnan, (2007), Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, Yogyakarta: Ombak.
- Mansvelt nt;194, Kraus 1984*, dalam Gusti Asnan, (2007), Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, Yogyakarta: Ombak.
- Munnick, de, De Inlandsche Nijverheid ter Sumatra's Weskust van Sumatra, TvNI, 49.
- Regeeringsalamanak 1868, Handbook voor Cultuur 1888;1889;1890;1900* dalam Gusti Asnan, (2007), Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, Yogyakarta: Ombak.
- Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1907*
- Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1908*
- Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1910*
- Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1911.*
- Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1916*
- Verslag van De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over Het Jaar, 1927*